

## ABSTRAK

### PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN GARUT

Oleh  
Andri Andaya  
NIM 82338220002

Maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia tidak lepas dari harga rokok yang dianggap semakin mahal di pasaran. Dari data penindakan rokok ilegal di tahun 2023, jumlah barang hasil penindakan di PJT adalah sebesar 73,5 juta batang. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di Kabupaten Garut sendiri sudah ada 5 kali operasi bersama yang dilakukan sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2023, yang berhasil mengamankan sekitar 3.071.119 batang rokok ilegal. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peredaran rokok tanpa pita cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut. 2) Untuk mengetahui *faktor penghambat dalam* peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian jenis hukum empiris. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terhitung sejak 2021 hingga 2023 angka peredaran rokok ilegal di Kabupaten Garut terus meningkat. banyaknya kerugian yang ditanggung negara akibat dari perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya 2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai, yaitu: Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, seperti kurangnya peran serta yang dilakukan oleh pedagang kecil, kurangnya pengetahuan dan peran serta yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian sulit untuk menemukan penyalur atau pengedar rokok ilegal. Faktor kurangnya jumlah Aparat penegak hukum, karena kecenderungan jumlah aparat penegak hukum yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang selalu bertambah, sehingga terdapat kurangnya angka aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana penegakan hukum tersebut

**Kata Kunci :** *Rokok tanpa pita cukai, UU Nomor 39 Tahun 2007*

## **ABSTRACT**

### **CIGARETTE CIGARETTE WITHOUT EXCISE TAPS IS BASED ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 39 OF 2007 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 11 OF 1995 CONCERNING EXCISE IN THE JURISDICTION OF GARUT DISTRICT**

**By  
Andri Andaya  
NIM 82338220002**

The widespread distribution of cigarettes without excise stamps in Indonesia cannot be separated from the price of cigarettes which are considered increasingly expensive on the market. From data on crackdowns on illegal cigarettes in 2023, the number of items resulting from crackdowns at PJT is 73.5 million cigarettes. This number has increased from previous years. Then in Garut Regency itself there have been 5 joint operations carried out from January to June 2023, which succeeded in confiscating around 3,071,119 illegal cigarettes. The research objectives are as follows: 1) To determine and describe the distribution of cigarettes without excise stamps in the Garut Regency Legal Area. 2) To determine the inhibiting factors in the circulation of cigarettes without excise stamps based on Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2007 concerning amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise in the Legal Area of Garut Regency. The research method used is an empirical legal research method. The approach used for this research is a legal sociology approach. The research results show that: 1) From 2021 to 2023 the number of illegal cigarette distributions in Garut Regency continues to increase. the large number of losses borne by countries as a result of irresponsible public behavior. Furthermore, 2) There are several factors that become obstacles in enforcing the law regarding the distribution of cigarettes without excise stamps, namely: Lack of public awareness, such as lack of participation by small traders, lack of knowledge and participation by the community, then it is difficult to find distributor or distributor of illegal cigarettes. The factor is the lack of number of law enforcement officers, due to the tendency for the number of law enforcement officers to be less compared to the number of people who are always increasing, so that there is a lack of law enforcement officers who are less than optimal in carrying out their duties as a means of law enforcement.

**Keywords: Cigarettes without excise stamps, Law Number 39 of 2007**